

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia semakin berkembang terutama yang berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan baik mobil maupun motor. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat ini membuat pemerintah provinsi harus menyediakan lahan parkir yang dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan keuntungan tersebut dapat disetor kepada pemerintah provinsi melalui retribusi.

Mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seiring dengan pertumbuhan sosial-ekonomi masyarakat yang memberikan dampak pada peningkatan mobilitas, sehingga pemasukan daerah dari sektor retribusi parkir akan meningkat pula. Oleh karena itu, pelayanan parkir merupakan langkah bagi pemerintah untuk mencari solusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, tentu dalam upayanya meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber PAD adalah retribusi daerah dimana daerah tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem perparkiran berbayar yang menggunakan Mesin Parkir Meter. Sistem perparkiran yang baru ini menggantikan sistem perparkiran yang sebelumnya dianggap kurang efektif.

Awal mulanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan sistem perparkiran berbayar dengan mesin parkir meter di pinggir jalan (*on street*) di Jalan H. Agus Salim (Sabang), Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mulai diterapkannya sistem perparkiran berbayar dengan mesin parkir meter mulai menunjukkan hasil yang luar biasa.

Kemudian sistem perparkiran berbayar ini mulai diberlakukan di sejumlah jalan yaitu di Jalan Falatehan, Jakarta Selatan. Dari parkir pinggir Jalan Fatalehan, Pemerintah DKI Jakarta memperoleh peningkatan pendapatan dari tarif layanan parkir.

Sistem perparkiran berbayar ini juga diberlakukan di pinggir jalan di Jalan Boeleward, Kelapa Gading. Pendapatan parkir pinggir jalan di Jalan Boeleward, Kelapa Gading mengalami peningkatan pendapatan yang paling tinggi dibandingkan dengan dua lokasi lainnya. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pada tahun 2018 sudah terpasang 1.000 unit mesin parkir meter di seluruh DKI Jakarta. Berikut adalah daftar hasil pendapatan transaksi dengan Mesin Parkir Meter atau Terminal Parkir Elektronik.

Tabel I.1
Pendapatan/Transaksi Mesin Parkir Meter

No.	Lokasi	Pendapatan Sistem Konvensional Per Hari (Rp)	Rata-rata Pendapatan Sistem Mesin Parkir Meter Per Hari (Rp)	Jumlah Mesin Parkir Meter (Unit)
1.	Jl. H. Agus Salim (Sabang), Jakarta Pusat	500.000	12.000.000	11
2.	Jl. Boulevard Raya Klp Gading, Jakarta Utara	4.750.000	45.000.000	87
3.	Jl. Falatehan, Jakarta Selatan	280.000	8.000.000	13

Sumber: Data dari UP Perparkiran DKI Jakarta

Awal pengoperasiannya, sistem perparkiran berbayar ini menggunakan uang koin sebagai pembayarannya. Pengguna mesin parkir meter harus memasukkan koin ke lubang tipis hitam sesuai tarif yang harus dibayarkan. Tarif parkir per jam adalah Rp 2.000,- untuk sepeda motor, Rp 5.000,- untuk mobil, dan Rp 8.000,- untuk bus atau truk. Pengguna dapat memastikan tarif yang bisa dibayar dengan koin Rp. 500,- atau Rp. 1.000,- dengan melihat layar pada mesin.

Pengguna harus memasukkan empat buah koin untuk mencapai tarif tersebut. Bila layar menunjukkan Rp. 2.000,- artinya seluruh koin masuk ke sistem di dalam mesin. Ketika koin tidak dapat terdeteksi pada mesin maka tidak akan terlihat di layar mesin dan koin akan langsung jatuh lewat tabung keluar seperti halnya telepon umum. Mesin parkir meter ini hanya bisa mendeteksi koin Rp. 500,- dan Rp. 1.000,-.

Namun cara membayar dengan menggunakan uang koin ini mulai menimbulkan masalah. Permasalahan ini disebabkan karena koin yang digunakan oleh pengguna tidak sesuai syarat aturan yang telah disediakan. Syarat tersebut antara lain, koin yang dimasukkan tidak boleh ada selotip yang menempel, koin rusak atau berlubang tidak bisa diproses oleh mesin dan pemindaianya hanya untuk koin nominal Rp. 1000,- serta Rp. 500,-. Terkadang ada pengguna yang memasukkan koin di luar nilai Rp. 1000,- dan Rp. 500,- dengan alasan pengguna tidak membawa uang koin sebesar yang sudah ditentukan.

Kemudian penerapan pembayaran perparkiran diganti dengan menggunakan elektronik yaitu *e-money*. Sistem perparkiran berbayar ini bekerja sama dengan enam bank, yaitu Bank DKI, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Mega.

Pembaruan sistem perparkiran berbayar ini tentunya mempengaruhi prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir. Agar pendapatan parkir terus meningkat diperlukannya prosedur serta pelaksanaan yang baik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir dengan menggunakan mesin parkir meter serta bagaimana penerapannya. Selain itu penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyajian retribusi parkir di dalam laporan keuangan, maka dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis memilih judul **“Analisis Prosedur dan Penerapan Pemungutan dan Penyetoran**

Retribusi Parkir yang Menggunakan Mesin Parkir Meter di DKI Jakarta”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur serta penerapan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir yang menggunakan mesin parkir meter?
2. Bagaimana penyajiannya di dalam laporan keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengetahui prosedur dan penerapan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir dengan menggunakan mesin parkir meter.

2. Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai prosedur retribusi parkir dengan sistem perparkiran berbayar yang menggunakan mesin parkir meter.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini agar sistem retribusi parkir dengan sistem perparkiran berbayar yang menggunakan mesin parkir meter dapat berjalan dengan lebih baik.